

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan makro ekonomi memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (*social welfare*). Kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengangguran yang rendah dan tingkat inflasi stabil dan rendah. Salah satu kebijakan yang termasuk pada kebijakan makro ekonomi ini adalah kebijakan moneter.

Kebijakan moneter di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. BI memiliki tujuan untuk menjaga dan memelihara stabilitas inflasi dan stabilitas nilai tukar. Kestabilan tingkat harga barang dan jasa juga menjadi bagian tugas BI dalam menjaga stabilitas inflasi. Selain itu, BI juga melaksanakan kebijakan moneter dengan mengacu pada sasaran inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Publikasi katalog IHK (2024) menjelaskan tentang Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai indikator inflasi. IHK merupakan indikator kenaikan tingkat harga secara umum untuk jenis barang dan jasa dengan kualitas atau merek yang dikonsumsi masyarakat pada umumnya. IHK juga merupakan indeks perubahan rata-rata harga suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam waktu tertentu. Oleh sebab itu, IHK menjadi indikator pengukur tingkat inflasi yang paling umum digunakan dibandingkan dengan indikator lainnya.

Bank Indonesia menjelaskan tentang disagregasi inflasi yang terdiri dari inflasi inti dan inflasi non inti. Inflasi inti merupakan komponen inflasi bersifat cenderung menetap. Komponen ini ditentukan oleh faktor fundamental seperti permintaan-penawaran, faktor eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional dan perkembangan ekonomi global) serta ekspektasi pedagang dan konsumen tentang inflasi. Sebaliknya, inflasi non inti merupakan komponen inflasi yang memiliki volatilitas tinggi (<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi>).

Rangkuty *et al.* (2022) menjelaskan tentang disagregasi pengukuran inflasi terdiri dari inflasi inti dan inflasi non inti. Inflasi inti disebut *core inflation* atau *underlying inflation*. Inflasi non inti merupakan komponen inflasi dengan volatilitas cukup tinggi karena ditentukan oleh faktor non fundamental. Komponen inflasi non inti dikelompokkan menjadi inflasi komponen bergejolak (*volatile food*) yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh *shock* kelompok bahan makanan, dapat berupa gangguan panen bahan pangan utama, gangguan alam, perkembangan harga komoditas dalam negeri, perkembangan harga komoditas pangan internasional dan

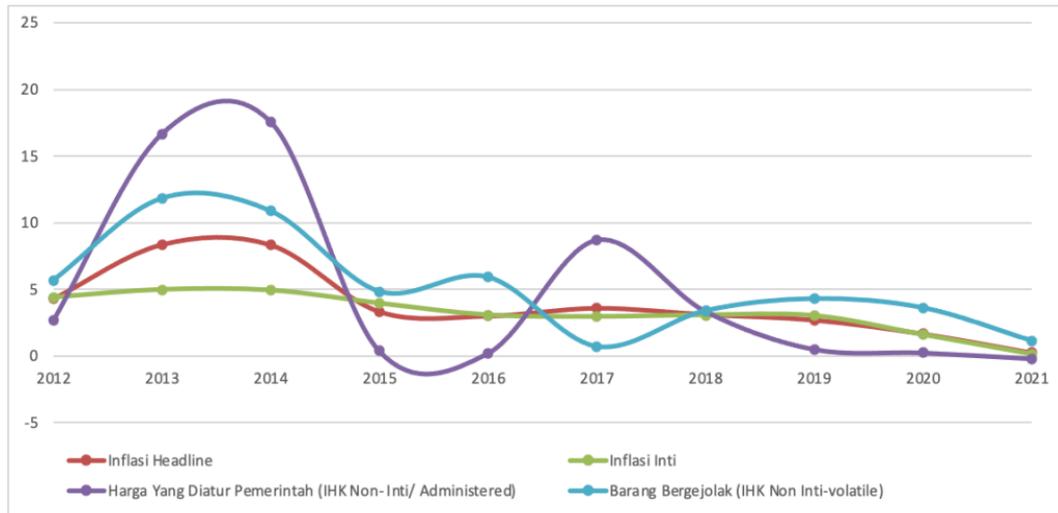
gangguan distribusi pasokan bahan pangan utama bagi masyarakat. Inflasi komponen kebijakan harga yang diatur oleh pemerintah disebut sebagai inflasi *administered prices*. Komponen inflasi non inti ini dominan dipengaruhi oleh *shock* akibat pemberlakuan kebijakan harga pemerintah seperti kebijakan keuangan pemerintah, harga energi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan dan kebijakan pengaturan harga lainnya.

Salah satu bagian kebijakan moneter Bank Indonesia yang bersifat *pro stability* (menjaga stabilitas), dalam upaya menjaga target inflasi adalah bauran kebijakan BI. Kebijakan BI untuk menjaga tingkat inflasi tetap rendah dan stabil ini diartikan sebagai upaya untuk menjaga fluktuasi inflasi. Ketidakstabilan fluktuasi inflasi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, menciptakan kesenjangan pendapatan, menghambat investasi produktif, mengurangi keinginan masyarakat untuk menabung dan berkurangnya daya saing produk nasional (Putranto,2024).

Selanjutnya, Putranto (2024) menjelaskan tentang sumber tekanan inflasi Indonesia saat ini didominasi oleh sisi *supply*. Inflasi domestik terutama didorong oleh kenaikan harga energi, pangan dan gangguan rantai pasokan. Kebijakan proteksi harga pangan dan energi telah menjadi rekomendasi kebijakan dalam upaya pengendalian inflasi melalui kebijakan harga pemerintah (*administered prices*) yang dilakukan agar dampak rambatan (*spillover*) inflasi dapat ditekan. Seperti contoh upaya pengendalian harga energi terutama Bahan Bakar Minyak (BBM). Dampak rantai pasok sebagai pola jalur distribusi barang menentukan tingkat harga-harga barang. Kondisi kualitas dan ketersediaan infrastruktur sebagai jalur distribusi tersebut dapat menentukan tingkat kewajaran kenaikan perubahan harga suatu komoditas. Distribusi barang yang lancar, efektif dan efisien akan menjaga stabilitas harga. Pola distribusi perdagangan antar daerah dapat berbeda akibat perbedaan kuantitas dan kualitas rantai pasok (infrastruktur). Semakin panjang rantai pasok distribusi suatu barang, maka harga barang tersebut akan semakin mahal.

Gambar 1 menjelaskan inflasi *headline* di Indonesia dibentuk dari inflasi inti dan inflasi non inti. Gambar inflasi inti terlihat datar, tidak bergejolak dan menunjukkan kondisi yang stabil. Penentu inflasi inti ini bersumber dari guncangan (*shock*) dan tekanan dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Namun, karakteristik inflasi non inti (*supply side*) di Indonesia bersifat paling bergejolak (*volatile*) dan besaran nilainya sangatlah berfluktuatif. Karakteristik ini dapat terlihat pada data inflasi non-inti yang terjadi pada tahun 2012-2013; tahun 2014-2015; tahun 2016-2017; dan tahun 2020-2021. Gejolak inflasi non inti dapat disebabkan oleh guncangan dari sisi penawaran seperti; (a) kebijakan pemerintah, (b) gangguan produksi dan (c) gangguan distribusi. Penyebab inflasi dari faktor guncangan sisi

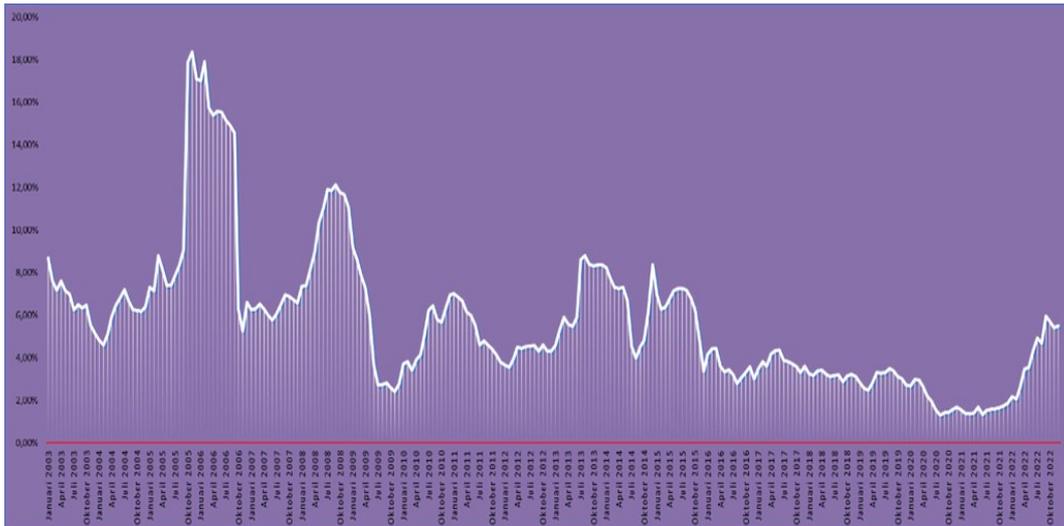
penawaran dapat pula bersumber dari faktor lainnya. Faktor penyebab inflasi non inti ini bersifat non-moneter. Pada akhirnya *shock* sisi *supply* inflasi ini akan menentukan pola inflasi *headline* yang terjadi secara nasional.



Sumber: Data diolah, 2023.

Gambar 1. Grafik Karakteristik Inflasi di Indonesia (tahun 2012-2021)

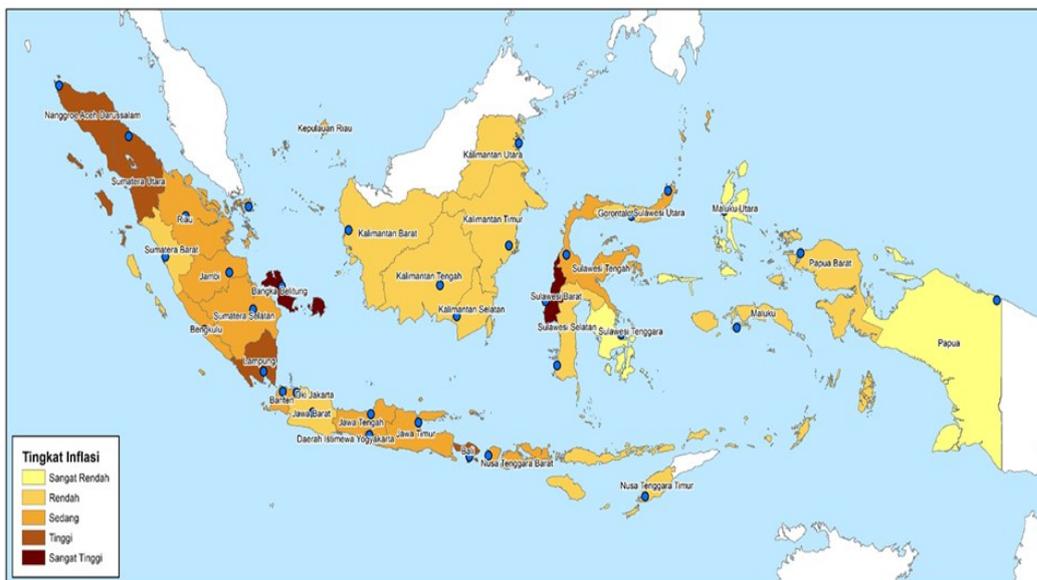
Selanjutnya, Gambar 2 menjelaskan tentang karakteristik pola pergerakan inflasi di Indonesia. Berdasarkan Gambar 2, tingkat inflasi bulanan di Indonesia diketahui berada pada tingkat tertinggi pada series data bulanan inflasi ke 196-207. Periode data inflasi bulan Desember 2002- Desember 2022, diketahui bahwa tingkat inflasi Indonesia berada pada level 14,55%- 18, 38%. Level ini terjadi pada periode bulan Oktober 2005-September 2006. Bulan Mei 2008-Desember 2008, inflasi Indonesia masih menunjukkan level dua digit yaitu berada pada rentang 10,38%-12,14% (*series* data bulan ke169-176). Bulan Desember 2011- Desember 2013, tingkat inflasi Indonesia mulai berada pada level inflasi lebih rendah yaitu berada pada level 3,56%- 8,79%. Bulan Januari 2016- Desember 2022, inflasi Indonesia telah berada pada tingkat 5,95% bahkan dapat mencapai tingkat terendah yaitu 1,32% di bulan Agustus tahun 2020. Tingkat inflasi sepanjang tahun 2022, yaitu dimulai pada bulan Januari 2022- Desember 2022, tingkat inflasi Indonesia telah berada pada tingkat 2,06% - 5,95%.



Sumber: Data diolah, 2023

Gambar 2. Grafik Inflasi Bulanan Indonesia Periode Desember 2002- Desember 2022

Perubahan level tingkat inflasi di Indonesia selama dua puluh tahun terakhir sangat berfluktuatif, namun menunjukkan kecenderungan yang terus turun. Kondisi ini terjadi karena setiap daerah di Indonesia memiliki karakter wilayah dan sumber daya yang saling berhubungan, sehingga pola inflasi ini berpotensi memberikan efek limpahan (*spillovers*) antar wilayah. Pola inflasi tersebut dapat dilihat pada peta pola sebaran inflasi di Indonesia pada Gambar 3.



Sumber: Data diolah, 2023

Gambar 3. Peta Pola Sebaran Inflasi di Indonesia

Gambar 3 menjelaskan bahwa sebaran inflasi di Indonesia terbentuk dan terpola berdasarkan cakupan pengelompokan wilayah provinsi di Indonesia. Berdasarkan Gambar 3, kecenderungan pola sebaran inflasi di Indonesia memiliki karakteristik yang terkonsentrasi di

suatu cakupan wilayah diduga akibat adanya efek limpahan (*spillover*) dari daerah lainnya (daerah tetangga). Kondisi ini terjadi karena antar wilayah memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Keterkaitan ekonomi antar daerah terjadi karena hubungan dan karakteristik setiap daerah dapat menjadi penentu besaran nilai inflasi IHK (*headline*) secara keseluruhan melalui efek nilai IHK Non inti. Pola kecenderungan laju inflasi rata-rata di Indonesia secara nasional terbentuk dari pola inflasi di setiap daerah provinsi. Pola yang terbentuk, secara khusus dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah daerah pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur. Inflasi di daerah Sumatra tergolong sedang karena menunjukkan penurunan angka inflasi pada tahun 2020-2021.

Selanjutnya, Gambar 3 juga menggambarkan tingkat inflasi pada beberapa kelompok wilayah di Indonesia mendekati rata-rata inflasi nasional. Diketahui bahwa inflasi di Sumatra (kecuali Aceh dan Kepulauan Bangka Belitung) menunjukkan nilai yang mendekati rata-rata inflasi nasional. Sedangkan inflasi pada wilayah Indonesia bagian timur menunjukkan penurunan bahkan menunjukkan nilai deflasi di beberapa daerah. Pada beberapa wilayah di pulau Sumatra (Meulaboh, Banda Aceh, Tanjung Pandan dan Pangkal Pinang), Sulawesi (Gorontalo dan Mamuju) dan wilayah Indonesia Timur (Denpasar, Singaraja dan Mataram) menunjukkan angka inflasi tinggi. Berbeda dengan angka inflasi di wilayah pulau Jawa terutama Jakarta yang menunjukkan angka inflasi tergolong rendah.

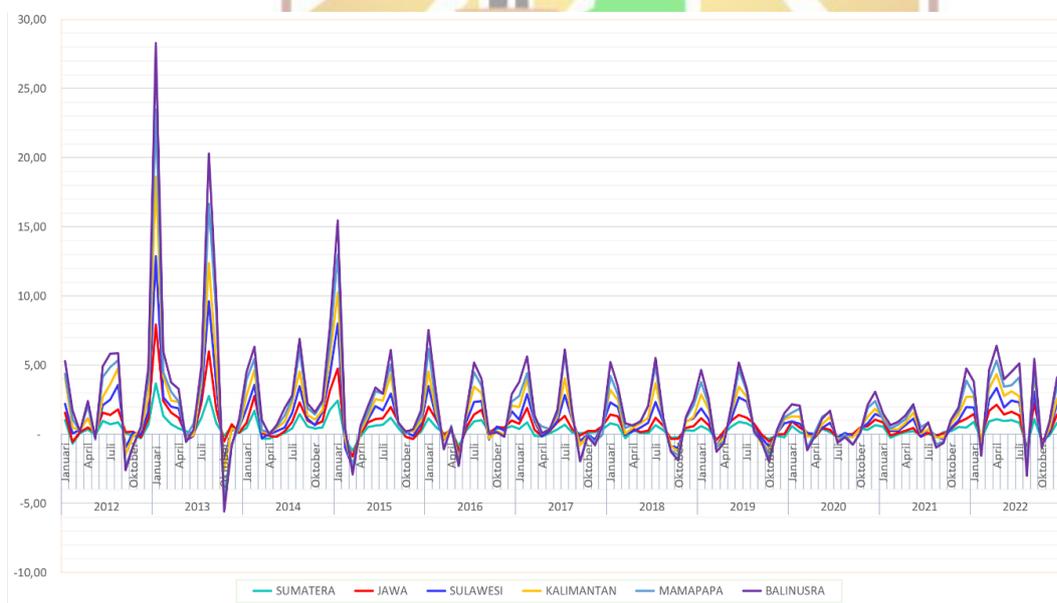
Pola inflasi yang terbentuk berdasarkan pengelompokan wilayah diduga karena terjadi efek spasial dan limpahan (*spillover*) antar wilayah, sehingga tolak ukur jarak antar wilayah diperlukan sebagai pertimbangan adanya interaksi pembentuk inflasi antar wilayah. Interaksi antar wilayah dapat menyebabkan tingkat inflasi suatu wilayah berhubungan erat dengan tingkat inflasi di wilayah provinsi-provinsi tetangga. Interaksi antar wilayah ini juga menyebabkan munculnya kecendrungan persamaan karakteristik inflasi di wilayah provinsi dengan lokasi yang berdekatan. Dengan demikian, faktor non-moneter ini dapat dipastikan menjadi penentu tingkat inflasi *headline*.

Keterkaitan pola hubungan antara inflasi dengan variabel makro ekonomi yang telah dijelaskan pada Gambar 3, merupakan bentuk interaksi bersifat dependen. Variabel makro ekonomi yang dimaksud adalah variabel kinerja institusi, infrastruktur dan variabel kebijakan keuangan pemerintah. Hubungan dependen variabel makro ekonomi merupakan bentuk interaksi saling berhubungan walaupun setiap wilayah memiliki karakter sumber daya masing-masing. Akibatnya, karakter inflasi dan pola hubungannya dengan variabel makro ekonomi lainnya saat ini tidak dapat hanya mempertimbangkan prosedur estimasi standar namun juga

harus mempertimbangkan faktor pengaruh lainnya yaitu faktor interaksi dan karakter antar wilayah.

Keterjangkauan persediaan barang dan jasa seperti di wilayah pulau Jawa terutama Jakarta merupakan pusat distribusi barang dan pusat perkembangan infrastruktur paling maju dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi ini menyebabkan keterjangkauan dan integrasi di wilayah ini berkembang sangat baik. Sebaliknya, disintegrasi antar wilayah menyebabkan tingginya biaya transportasi untuk pendistribusian barang dan jasa kebutuhan masyarakat seperti yang terjadi di luar pulau Jawa. Biaya transportasi yang tinggi dapat menjadi salah satu pemicu angka inflasi tinggi.

Selanjutnya, Gambar 4 menjelaskan bahwa, karakteristik atau pola inflasi yang terbentuk di seluruh provinsi di Indonesia dibagi menjadi enam kelompok wilayah. Perbedaan harga yang berlaku di setiap provinsi menyebabkan laju inflasi di setiap kelompok wilayah provinsi juga memiliki perbedaan. Laju inflasi antar provinsi disebabkan oleh pengaruh perbedaan harga antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Namun, karena faktor kedekatan geografis serta karakteristik setiap wilayah provinsi di Indonesia diperkirakan dapat memicu terjadinya pola *spillover* (efek limpahan inflasi) antar provinsi. *Spillover* ini dapat menyebabkan tingkat inflasi pada suatu provinsi memberikan efek limpahan bagi tingkat inflasi pada provinsi lain.



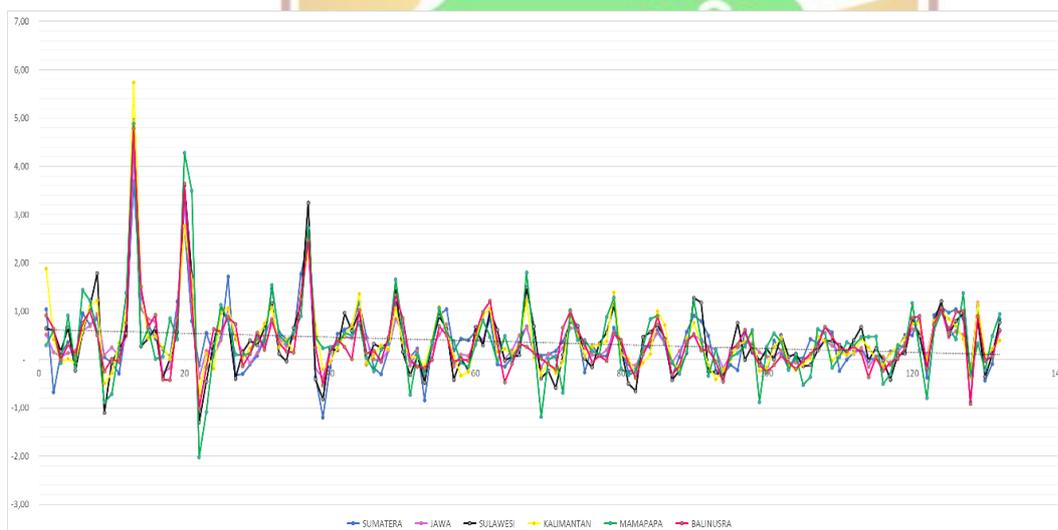
Sumber: Data diolah, 2023

Gambar 4. Grafik Pola Inflasi Antar Wilayah di Indonesia

Gambar 4 juga menjelaskan bahwa pola pergerakan inflasi tergambar mengikuti pola pergerakan hampir sama di seluruh wilayah. Diketahui bahwa, setiap perubahan tingkat inflasi

triwulanan pada awalnya menunjukkan tingkat lebih tinggi, yaitu bulan November, Desember dan Januari. Namun, kemudian terjadi kecenderungan penurunan tingkat inflasi dengan pola hampir sama pula. Tingkat inflasi di wilayah Indonesia cenderung akan turun pada bulan Februari-April. Tingkat inflasi pada triwulan ke dua, yaitu rentang data bulan Mei-Juli, inflasi akan kembali naik hingga akhirnya turun kembali pada triwulan terakhir yaitu bulan Agustus-Oktober. Pola inflasi wilayah di Indonesia cenderung kembali tinggi pada bulan Desember dan bulan Januari mengikuti pola triwulanan inflasi sebelumnya.

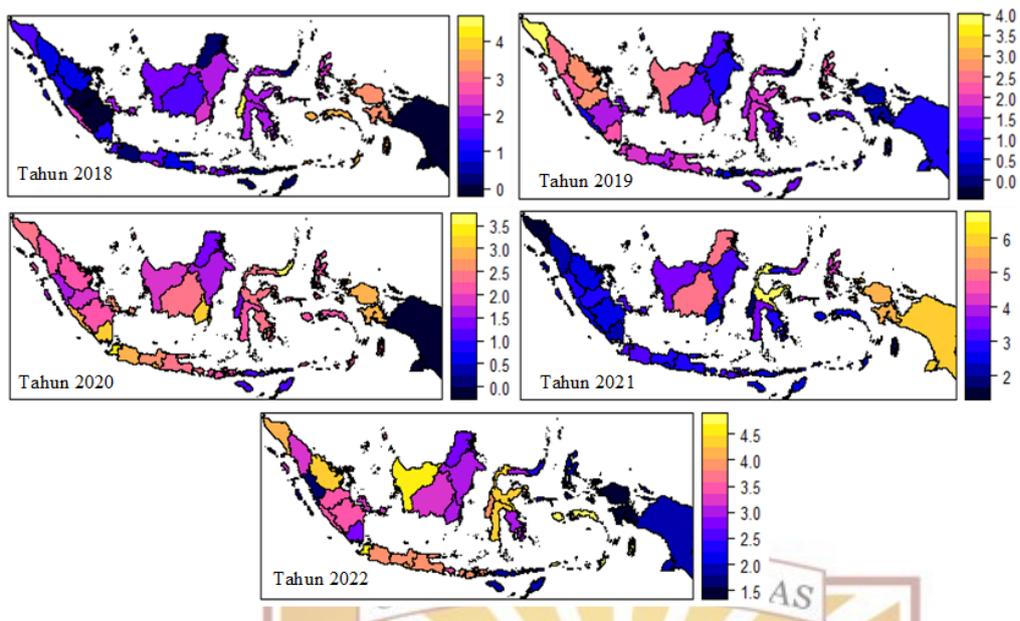
Gambar 5 menjelaskan tentang pergerakan tingkat inflasi berdasarkan kelompok wilayah provinsi di Indonesia. Pengelompokan ini dibagi atas kelompok wilayah Sumatra, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Balinusra (wilayah Bali dan Nusa Tenggara) dan Mamapapa (wilayah Maluku dan Papua). Pergerakan inflasi ini dijelaskan berdasarkan data bulanan kelompok wilayah provinsi dalam rentang waktu bulan Januari tahun 2012- bulan Desember tahun 2022.



Sumber: Data diolah, 2023

Gambar 5. Grafik Tingkat Inflasi Bulanan Wilayah di Indonesia Tahun 2012-2022

Visualisasi tentang karakteristik inflasi di Indonesia dapat pula dibagi berdasarkan unit analisa seluruh provinsi di Indonesia. Unit analisis provinsi ini dirincikan untuk lima tahun data panel. Visualisasi diperoleh dari data peta *splot* (idn.map) yang diekstrak dari sumber data *shp.map* (*shapefile map*) seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Gambar 6 memperlihatkan hasil visualisasi karakteristik inflasi di Indonesia dalam lima tahun data penelitian:



Sumber: Data diolah, 2023

Gambar 6. Visualisasi Peta Pola Sebaran Inflasi di Indonesia tahun 2018-2022

Gambar 6 menjelaskan tentang visualisasi karakteristik pola sebaran inflasi yang dibentuk menjadi lima skala pengelompokan. Tahun 2018 pola tingkat inflasi tertinggi berada pada kelompok pola berwarna kuning dengan tingkat inflasi berada pada level $\geq 4\%$. Pola inflasi tertinggi ini terjadi pada wilayah pulau Sulawesi Tenggara. Sedangkan pola tingkat inflasi terendah (deflasi) berada pada kelompok pola berwarna hitam dengan tingkat inflasi berada pada level $\geq 0.09\%$. Pola inflasi terendah ini terjadi pada wilayah Provinsi Sumatra Selatan, Jambi dan Papua.

Tahun 2019, pola tingkat inflasi tertinggi berada pada kelompok pola berwarna kuning dengan tingkat inflasi berada pada level 3.75%. Pola inflasi tertinggi ini terjadi pada wilayah pulau Sumatra paling utara di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh. Sedangkan pola tingkat inflasi terendah (deflasi) berada pada kelompok pola berwarna hitam dengan tingkat inflasi berada pada level $\geq 0.18\%$. Pola inflasi terendah ini tersebar pada beberapa wilayah di Indonesia khususnya pada daerah yang berada pada perbatasan laut dan Samudra yang mengelilingi wilayah-wilayah tersebut (Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Papua Barat dan NTB).

Tahun 2020, pola tingkat inflasi tertinggi berada pada kelompok pola berwarna kuning dengan tingkat inflasi berada pada level $\geq 3.52\%$. Pola inflasi tertinggi ini terjadi pada wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Banten. Sedangkan pola tingkat inflasi terendah (deflasi) berada pada kelompok pola berwarna hitam dengan tingkat inflasi berada pada level $\geq 0.03\%$. Pola inflasi terendah ini tersebar pada beberapa wilayah di Indonesia khususnya pada Provinsi Papua, Kalimantan Timur dan NTT.

Tahun 2021, pola tingkat inflasi tertinggi berada pada kelompok pola berwarna kuning dengan tingkat inflasi berada pada level $\geq 6.46\%$. Pola inflasi tertinggi ini terjadi pada wilayah pulau Sulawesi Tengah. Sedangkan pola tingkat inflasi terendah (deflasi) berada pada kelompok pola berwarna hitam. Pola inflasi terendah ini terjadi pada wilayah pulau Sumatra paling utara di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh dengan tingkat inflasi berada pada level $\geq 1.65\%$.

Tahun 2022, pola tingkat inflasi tertinggi berada pada kelompok pola berwarna kuning dengan tingkat inflasi berada pada level $\geq 4.55\%$. Pola inflasi tertinggi ini terjadi pada wilayah Provinsi Maluku, Banten dan Kalimantan Barat. Sedangkan pola tingkat inflasi terendah (deflasi) berada pada kelompok pola berwarna hitam dengan tingkat inflasi berada pada level $\geq 1.56\%$. Pola inflasi terendah ini tersebar pada beberapa wilayah di Indonesia khususnya pada daerah yang berada pada perbatasan laut dan Samudra yang mengelilingi wilayah-wilayah tersebut (Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, dan NTT).

B. Masalah Penelitian

Fenomena pola dan pergerakan inflasi di Indonesia telah dijelaskan dari Gambar 1 hingga Gambar 6 pada bahagian latar belakang penelitian. Setiap gambar memberikan indikasi awal bahwa angka inflasi tidak dibentuk begitu saja. Inflasi dibentuk dari faktor inflasi inti, inflasi non inti dan faktor *spatial-spillover*. Perubahan inflasi di suatu daerah ditentukan oleh faktor interaksi spasial antar wilayah dan pola *spillover*nya. Namun, sampai saat ini belum diketahui secara empiris derajat *spillover*, dampak *spillover* inflasi terhadap wilayah pengirim dan penerima inflasi di Indonesia, dan pola *spillover* inflasi di Indonesia. Selain dari itu, juga belum diketahui faktor penentu inflasi non inti di Indonesia. Berdasarkan penjelasan ini, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah;

1. Berapa derajat *spillover* inflasi dan dampak *spillover* inflasi terhadap wilayah pengirim dan penerima inflasi di Indonesia?
2. Bagaimana pola *spillover* inflasi di Indonesia?
3. Apa faktor penentu inflasi non inti di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah;

1. Menentukan derajat *spillover* inflasi dan dampak *spillover* inflasi terhadap wilayah pengirim dan penerima inflasi di Indonesia.
2. Menemukan pola *spillover* inflasi di Indonesia.
3. Menentukan faktor yang menentukan inflasi non inti di Inonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari sisi ilmu pengetahuan, penelitian ini merupakan upaya penambahan wawasan dan pengetahuan lebih mendalam tentang inflasi khususnya karakter inflasi dari sisi non inti. Selanjutnya, penelitian ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dan pihak berkepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan terkait penentuan inflasi *headline*. Kebijakan target inflasi berdasarkan pertimbangan kajian kebijakan moneter Bank Indonesia dapat diperluas menjadi rekomendasi bauran kebijakan moneter dan kebijakan pemerintah terutama dari sisi kebijakan fiskal dan keuangan pemerintah.

E. Batasan Penelitian

Cakupan wilayah penelitian ini adalah Indonesia. Pembahasan cakupan wilayah ini mempertimbangkan pengukuran efek spasial hingga efek *spillover* dengan faktor penimbang matriks jarak antar wilayah. Adapun tahun analisa menggunakan series data panel waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 untuk seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan struktur series data runtun waktu (*time series*) dari tahun 2011 hingga tahun 2022. Struktur data *time series* ini digunakan untuk menemukan dan menganalisa derajat *spillover*, dampak *spillover* inflasi terhadap wilayah pengirim dan penerima inflasi di Indonesia dan pola sebaran inflasi di Indonesia. Seluruh provinsi di Indonesia dibagi menjadi enam kelompok wilayah dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan variabel sehingga dapat menjelaskan dengan baik tentang karakter pola data runtun waktu inflasi di Indonesia.

Struktur data panel lima tahun (tahun 2018-2022) pada penelitian ini digunakan untuk dampak *spillover* inflasi terhadap wilayah pengirim dan penerima inflasi di Indonesia dan menemukan faktor yang menentukan inflasi non inti di Inonesia, dengan menggunakan pengukuran nilai variabel melalui efek gangguan produksi dari mengkonsumsi energi. Pengukuran juga dilakukan pada sisi gangguan distribusi. Gangguan distribusi merupakan kondisi infrastruktur yang dinilai dari *range* (jangkauan) jarak tempuh jalur distribusi antar wilayah. Adapun cakupan penelitian kebijakan pemerintah merupakan bentuk kinerja institusi pemerintah yang berkaitan dengan penentuan nilai inflasi *headline* melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah, kebijakan keuangan pemerintah. Kebijakan keuangan pemerintah diukur dengan nilai variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel pengeluaran pemerintah daerah.

F. Kebaharuan

Penelitian ini menggunakan perangkat model VAR dengan *Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) Diebold-Yilmaz* dan model panel spasial ekonometrika. Pemodelan spasial ekonometrika pada akhirnya dapat menentukan derajat efek *spillover* inflasi di Indonesia. Penggunaan dua model ini merupakan bentuk pengembangan model yang menjadi kebaharuan penelitian ini, karena memasukkan unsur pembahasan tentang karakteristik inflasi dari *shock sisi supply* dan *connectedness analysis* untuk menjelaskan tentang derajat *spillover* inflasi, dampak *spillover* inflasi terhadap wilayah pengirim dan penerima inflasi di Indonesia dan pola *spillover* inflasi di Indonesia.

Model VAR dengan FEVD Diebold-Yilmaz umumnya digunakan pada analisis pasar keuangan dengan melibatkan variabel utama pasar keuangan seperti harga saham, obligasi, suku bunga dan lain-lain. Kajian penentu inflasi di Indonesia umumnya membahas faktor penentu dari sisi kajian kebijakan moneter seperti suku bunga. Model panel spasial ekonometrika pada umumnya digunakan pada studi empiris perencanaan lintas wilayah, kajian ekonomi regional, kajian rekomendasi kebijakan pembangunan pemerintah dan indikator makro ekonomi sebagai penentu pertumbuhan ekonomi.

Kebaharuan model VAR dengan FEVD Diebold-Yilmaz pada penelitian ini adalah penggunaan variabel utama inflasi dengan mengelompokkan wilayah provinsi di Indonesia. Pemodelan ini dapat menggambarkan tentang derajat dan pola *spillover* yang mungkin dapat terjadi antar wilayah provinsi di Indonesia.

Kebaharuan penelitian ini juga membahas tentang karakter inflasi akibat *shock supply side* yaitu variabel gangguan produksi disebabkan oleh penggunaan konsumsi energi. Faktor kebijakan pemerintah merupakan bentuk praktek kinerja institusi dari pihak tim pengendali inflasi daerah, pusat dan institusi lainnya. Variabel gangguan kejutan (*shock*) pasokan atau gangguan distribusi akibat tidak tercukupinya infrastruktur diprosikan dengan jarak antar wilayah sebagai akses penghubung setiap daerah. Unsur kebijakan pemerintah dari sisi pengelolaan keuangan dan fiskal pemerintah juga dijadikan sebagai faktor penentu. Kebijakan pengelolaan keuangan dan fiskal pemerintah ini seperti PAD dan pengeluaran pemerintah.

Metode panel spasial merupakan teknik menganalisa dan menyimpulkan faktor-faktor penentu inflasi di suatu wilayah dengan menafsirkan parameter interaksi jarak antar wilayah. Karakteristik setiap wilayah dianalisa untuk menemukan efek langsung, efek limpahan tidak langsung (*spillover*) dan variabel penentu lainnya (*independent*). Hasil penafsiran parameter diduga dapat menjadi bias dan inkonsisten apabila faktor interaksi antar wilayah tidak

dimasukkan ke dalam model. Faktor interaksi spasial antar wilayah ini diidentifikasi dengan menggunakan matrik pembobot ketergantungan spasial, yaitu jarak antar wilayah.

